**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Dakwah merupakan aktifitas amal yang berasal dari dorongan iman. Dimana iman tidak hanya pada tataran lisan dan hati tetapi iman dimanisfestasikan dalam bentuk amal nyata. Terutama dalam aktifitas kemasyarakatan yang dilakukan secara teratur untuk memengaruhi cara orang merasakan, berpikir, berperilaku, dan bertindak pada aturan kenyataan individual, sosial budaya dan perekonomian masyarakat dalam rangka mengusahakan terimplementasikannya ajaran Islam dalam kehidupan manusia sehari-hari.[[1]](#footnote-2)

Realitas kehidupan akan selalu menjadi sasaran dakwah yang harus dipandang secara komprehensif tanpa ada yang diprioritaskan. Dalam sejarah perkembangan dakwah Islam selalu dihadapkan dengan persoalan yang ada dimasyarakat, termasuk persoalan kemiskinan, kebodohan, sosial budaya dan lingkungan disamping persoalan agama. Persoalan yang kompleksitas ini tidak akan mampu diselesaikan dengan hanya dakwah dalam bentuk tabligh saja, tetapi dakwah mesti dipahami dan dilaksanakan dalam bentuk kerja nyata. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terhindar dari kemiskinan dan kebodohan yang merupakan musuh agama.

Menurut Moh Azis dakwah dapat dipahami secara sempit dan luas. Dakwah dalam arti sempit hanya pembicaraan sekitar ritual atau ibadah mahdah sesuai dengan tuntunan al Quran dan Sunnah dengan sistem penyampaian berupa tabligh. Sementara dakwah dalam arti luas terkait dengan apa yang ada dalam pikiran mansia dan seluruh persoalan kehidupan manusia sepanjang zaman tentunya penyampaian tidak hanya bentuk tabligh tetapi dalam bentuk kerja yang terorganisir.[[2]](#footnote-3)

Para ilmuan memberikan batasan-batasan tertentu sesuai dengan pandanganya masing-masing dalam memahami dakwah secara luas. Perbedaan tersebut memiliki konsekwensi logis, selain mempengaruhi sistem, namun juga mempengaruhi materi dan metode yang relevan yang digunakan. sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeik Ali Mahfuz memberikan penekanan kajiannya kepada *al-khair* dan *al-huda*  yaitu kebaikan dan petunjuk yang diartikan segala tuntunan Islam dengan tujuan akhirnya yang ingin dicapai adalah kebahagian dunia dan akhirat.[[3]](#footnote-4) Ia menyakinkan bahwa tidak mesti menyebutkan siapa subjeknya namun siapa saja yang melakukan kebaikan untuk kebahagian dunia dan akhirat, maka hal ini merupakan indikator bahwa dakwah mencakup segala hal dalam urusan kehidupan dunia.

Dakwah mesti memberikan solusi kepada umat Islam yang menyangkut permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan, disamping menyampaikan dan memberi pemahaman tentang praktek ibadah. Kemiskinan dan kebodohan merupakan persoalan yang selalu mengitari umat islam yang mesti menjadi perhatian besar bagi para juru dakwah dalam mengurangi dan bahkan menghapus kebodohan dan meningkatkan perekonomian umat menjadi lebih baik.

Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat islam merupakan dakwah yang terstruktur, teratur dan terukur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nanih secara etimologi pengembangan berarti memberdayakan, menguatkan, membina, dan mensejahterakan.[[4]](#footnote-5) Secara terminology, pengembangan masyarakat Islam berarti usaha bersama dan terencana untuk mensejahterakan umat Islam disegala aspek kehidupannya sesuai dengan Al Quran dan Sunnah.

Pada dasarnya Islam adalah agama permberdayaan sebagaimana dalam Al Quran surat Ar Ra’du ayat 11:[[5]](#footnote-6)

.......

“*Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu umat sehingga mereka merobah keadaan”*

Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment.* Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.[[6]](#footnote-7)

Menurut Pranaka istilah atau konsep pemberdayaan dilatar belakangi dengan adanya pemberian kemampuan dan pengalihan kekuasaan atau kekuatan kepada individu, kelompok atau masyarakat agar berdaya. Kemudian selanjutnya memberikan dorongan atau motivasi kepada individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dari potensi yang dimiliki sehingga mampu hidup mandiri dan menentukan pilihan hidup yang lebih baik.[[7]](#footnote-8)

Istilah pemberdayaan terdapat dalam Al Quran, pada surat Al Kahfi ayat 84 dan Al Qashash 57.[[8]](#footnote-9)

*“Sesungguhnya Kami telah menyerahkan kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya petunjuk (untuk mencapai) segala sesuatu”,*

.....

*......“(Allah Berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kepada manusia kekuasaan atau kedudukan agar mampu memberdayakan dirinya dan orang lain, sebagaimana Rasulullah saw dalam memberdayakan sahabat pada periode Makkah dengan pembentukan akidah yang mendalam sehingga melahirkan sahabat yang kokoh dan tangguh untuk menghadapi kehidupan, kemudian pada periode Madinah cakupannya lebih luas yakni masalah ibadah dan muamalah.

Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat di atas, misalnya: pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan para investor. Pemerintah yang merupakan lembaga resmi dalam melayani dan mengayomi rakyat tentu paling bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat yang diharapkan memiliki peran yang dominan dibanding lembaga-lembaga lainnya.

Salah satu pengembangan atau pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pada bidang pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya seperti: kerajinan tangan, cinderamata, akomodasi dan transpotasi.[[9]](#footnote-10)

Berbicara tentang pariwisata maka ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20 Allah berfirman:

*Katakanlah: "hendak kalian berjalan di (muka) bumi, Maka saksikanlah bagaimana Allah menciptakan (makhluk) kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir, sungguh Allah mahakuasa atas segala sesuatu.*

Pada ayat di atas Allah perintahkan kepada manusia untuk melakukan perjalanan dimuka bumi dengan melihat keindahan ciptaan Allah swt, seraya mengambil hikmah dan pelajaran, baik di darat maupun di laut. Agar manusia dapat menyaksikan dan berfikir atas kebesaran Allah yang pada akhirnya dapat meningkatkan keimanan. Ayat ini menjadi landasan atau motivasi dalam pengelolaan pariwisata, baik pariwisata alam maupun pariwisata buatan.

Pariwisata merupakan Industri non migas yang dalam kegiatannya melibatkan beberapa sektor seperti: sektor sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Dengan banyaknya sektor yang terlibat dalam kepariwisataan memungkinkan untuk menjadi perhatian besar dari berbagai pihak. Dimungkinkan bahwa pariwisata merupakan fenomena sosial, ekonomi, budaya, psikologi, dan geografi.[[10]](#footnote-11) Pariwisata Bali misalnya sudah menjadi destinasi wisata internasional yang dapat menambah devisa bagi negara dan mensejahterakan penduduk sekitarnya. Bali yang memiliki keindahan alam, keunikan budaya dan masyarakat yang ramah mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia internasional, mereka mengenal indonesia dengan wisata Bali[[11]](#footnote-12).

Saat ini pemerintah daerah sangat giat dalam membangun daerah, apalagi dengan berlakunya UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola dan membangun sendiri daerahnya dengan potensi yang dimiliki baik Sumber daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya. Tuntutan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diharapkan, dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selaras dengan UU No 9 1990 tentang kepariwisataan yang berbunyi bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan peranan yang besar dalam pengelolaan pariwisata. Dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, tentunya masyarakat merupakan bagian terpenting dalam mengembangkan potensi lokal, alam dan budaya setempat.

Perencanaan pengembangan pariwisata saat ini menggunakan community based development atau community approach. Dalam hal ini masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi.[[12]](#footnote-13)

Selain itu juga diperkuat dengan, analisis tentang “modal sosial” (*social capital*) terhadap arti penting partisipasi masyarakat dalam pengembangan, menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan *sinergi* dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat maupun sinergi dalam menjaring komunitas” (*community network*).[[13]](#footnote-14)

Menurut Nurmawati,[[14]](#footnote-15)pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksitas dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Tujuan awal dari pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang berasal dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Panji,[[15]](#footnote-16) masih minimnya usaha-usaha pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat lokal.  Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasiskan alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keindahan, kebersihan ,keamanan, dan ketentraman, lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang positif bagi wisatawan dalam rangka  mendukung program sapta pesona, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata.

Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan wisata yang memeberikan kepada masyarakat setempat keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya. Pembangunan pariwisata seyogyanya bertujuan melibatkan masyarakat. Suatu program dikatakan melibatkan masyarakat ketika masyarakat sudah diajak melaksanakan suatu program tertentu. Tentunya ini merupakan partisipasi yang seringkali disalah artikan secara sempit sebagai keterlibatan. Padahal sebenarnya sebuah program dikatakan bersifat partisipatif apabila masyarakat sudah terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Sebagai contoh di daerah lain dalam sebuah penelitian, masyarakat yang berada disekitar objek wisata Candi Sukuh dan Air Terjun Jumog Karanganyar. Masyarakat mengaku bahwa mereka pernah diajak untuk berdiskusi bahwa disekitar areal tempat tinggal mereka akan dibangun tempat wisata. Materi diskusi masih sebatas itu, sedangkan setelah berjalannya obyek wisata tersebut masyarakat kurang terlibat.[[16]](#footnote-17)

Gambaran objek wisata yang ada di beberapa daerah Sumatera Barat memiliki kondisi yang berbeda. Pariwisata yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat seperti wisata Lubuk Nyarai kabupaten Padang Pariaman memiliki partisipasi tinggi, mulai dari perencananaan, pelaksanaan, manfaat dan evaluasi. Sementara partisipasi masyarakat di beberapa destinasi wisata seperti Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Pantai Air Manis di Kota Padang dan Nagari Pariangan di Kabupaten tanah Datar yang menjadi objek penelitian peneliti, masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan belum memiliki dampak yang siknifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam pengelolaan areal tempat wisata agar timbul rasa memiliki dari masyarakat. Pelibatan tersebut seharusnya mulai dari perencanaan, yaitu apapun yang ingin dirancang oleh pengelola tempat pariwisata didiskusikan dengan masyarakat. Dengan harapan masyarakat akan merasa memiliki program tersebut, dan turut membantu kesuksesan program tersebut. Pada prinsipnya masyarakat itu sendiri berhak ikut serta dalam pengelolaan pariwisata. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dalam pasal 19 ayat 2 bahwa setiap orang atau masyarakat dalam atau di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan pengelolaan.[[17]](#footnote-18)

Dengan terbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang kepariwisataan tersebut maka ada landasan yang mengatur tentang hak masyarakat untuk bersama-sama mengelola pariwisata. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan perdesaan. Menurut Rahardjo Adisasmita dalam buku pembangunan perdesaan, masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka, maka masyarakat harus diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi. Mereka memahami tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.[[18]](#footnote-19) ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting.terutama adalah tujuan akhir dari pembangunan.

Pembangunan pariwisata yang berdasarkan partisipasi masyarakat lokal secara umum dapat dilihat setidaknya dari dua dimensi yakni partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan dalam menenerima manfaat. Di tingkat pengambilan keputusan masyarakat dianjurkan agar memiliki kontrol atas sumber daya pariwisata, mempunyai insiatif dan mampu membuat keputusan yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka.

Partisipasi masyarakat lokal pada tataran penerimaan manfaat dapat tercemin dari penyedian lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pendidikan masyarakat lokal tentang pariwisata dan kewirausahaan, serta meningkatnya kesadaran publik pariwisata. Kesadaran publik yang meningkat akan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi wisatawan dan mampu meningkatkan citra destinasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menerima manfaat dari kegiatan pariwisata.

Masyarakat lokal dapat berpatisipasi pada beberapa tahap yakni: pada tahap insiasi, legitimasi dan eksekusi atau dengan kata lain, pada tahap *decision making, implementation, benefit* dan tahap *evaluatif*.[[19]](#footnote-20) Bintaro Tjokroamidjojo dan Kaho, menyatakan bahwa: *Pertama* partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan aktif dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan di wilayahnya; *Kedua* adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan atas partisipasi yang dilakukannya. Faktanya masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya anggapan bahwa untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan ,masyarakat dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. Dalam hal ini, masyarakat lebih ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar.

Persoalan lain yang muncul adalah partisipasi masyarakat seringkali hanya digunakan sebagai label maupun alat bagi konsultan, pemerkasa proyek pembangunan, maupun pemerintah untuk menekan biaya, seperti yang diungkapkan oleh Chambers yakni.[[20]](#footnote-21) *Pertama*. Masyarakat hanya digunakan sebagai label untuk berpartisipasi, *kedua* masyarakat dimanfaatkan sebagai alat untuk menekan biaya.

Partisipasi masyarakat tidak selalu menjamin untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, namun dengan partisipasi dan keikutsertaan mereka dalam prosese pekerjaan, maka akan tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat (publik) dengan administrator (pemerintah). Hubungan ini akan mengarah kepada lahirnya saling pengertian antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Denhart[[21]](#footnote-22) ada tiga manfaat partisipasi masyarakat, yaitu manfaat politis, pembuatan aturan, dan legitimasi pemerintah. Manfaat politis berkaitan dengan keputusan yang mencerminkan pendapat sebagian besar masyarakat atau terperhatikannya pendapat sebagian kelompok tertentu yang sejalan dengan norma demokrasi. Manfaat yang berkenaan dengan pembuatan aturan, berhubungan dengan pembuat keputusan yang dapat memenuhi kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Sedangkan manfaat partisipasi yang berhubungan dengan legitimasi pemerintah, merupakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dimana mereka kemungkinan akan lebih mendukung keputusan yang dibuat serta mendukung lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengambilan dan implementasi dari keputusan tersebut.

Saat ini pariwisata yang melibatkan masyarakat secara penuh adalah pariwisata yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri seperti desa wisata. Hal ini diupayakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan suatu wilayah atau desa.. Dalam bentuk ini dilakukan pengembangan pariwisata yang tidak dilepaskan dari ciri kegiatan masyarakat perdesaan yang telah ada, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya. Secara esensial desa wisata merupakan pengembangan suatu desa dengan memanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata menjadi satu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu dan memiliki tema tertentu sesuai dengan karakteristik desa.

Berdasarkan esensi desa wisata tersebut maka suatu desa disebut sebagai desa wisata apabila mampu menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat keseharian warga desa, arsitektur bangunan desa, atau kegiatan-kegiatan keseharian warga desa yang bernilai unik dan menarik, baik berupa atraksi-atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, dan keunikan lain yang dimiliki oleh suatu desa.

Sumatera Barat merupakan daerah wisata yang memiliki beberapa desa wisata menjadi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara, menurut wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Nasrul Abit mengatakan “hingga september 2016 wisatawan mengunjungi Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.195.000 yang di dominasi oleh wisatawan nusantara sebanyak 5,161.634 dan wisatawan asing sebanyak 33.366. Saat ini, katanya peringkat Sumbar sebagai daerah tujuan wisatawan mancanegara berdasarkan pintu masuk melalui BIM berada pada peringkat 9 dari 19 pintu masuk bandara di Indonesia. "Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar tahun 2015 38,21 persen," ujarnya.[[22]](#footnote-23)

Adapun Visi misi Dinas Pariwisata Propinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya Sumatera barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya di wilayah Indonesia bagian barat dengan misinya sebagai berikut :

1. Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis Agama dan budaya yang berwawasan lingkungan berdasarkan keunggulan kompetitif dan komparatif
2. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara selektif, fokus dan sinergis, efektif dan efisien
3. Mengembangkan industri pariwisata yang profesional dan berdaya saing
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien.

Sumatera Barat merupakan salah satu [propinsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi) yang ada di indonesia terletak di pulau [Sumatera](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera) dengan Ibukota [Padang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang). Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah [pulau](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau) di [lepas pantainya](https://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindia) seperti [Kepulauan Mentawai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Mentawai). Dari arah utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Riau [Sumatera Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara), [Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Riau), Bengkulu dan [Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi).

Sumatera Barat merupakan rumah bagi etnis [Minangkabau](https://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau), walaupun saat ini wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif propinsi Sumatera Barat. Jumlah penduduk saat ini sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beragama [Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam). Provinsi ini terdiri dari 7 kota dan 12 [kabupaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten) dengan pembagian wilayah administratif sesudah [kecamatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan) di seluruh kabupaten (kecuali [kabupaten Kepulauan Mentawai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Mentawai)) dinamakan sebagai [nagari](https://id.wikipedia.org/wiki/Nagari).

Salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia adalah Sumatera Barat. Dengan fasilitas wisatanya yang cukup baik, serta sering diadakannya berbagai festival khas daerah dan event internasional, menjadi salah satu daya tarik datangnya wisatawan ke provinsi ini. Ada beberapa kegiatan internasional yang diselenggarakan untuk menunjang pariwisata Sumatera Barat adalah lomba balap sepeda [*Tour de Singkarak*](https://id.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Singkarak), kejuaraan selancar *Mentawai International Pro Surf Competition* even paralayang serta *Event Fly for Fun in Lake Maninjau.[[23]](#footnote-24)*

Sumatera Barat memiliki hampir semua jenis [objek wisata](https://id.wikipedia.org/wiki/Objek_wisata), diantaranya: wisata alam seperti laut, pantai, danau, gunung, dan *Ngarai*. Wisata budaya yang khas, seperti [Festival Tabuik](https://id.wikipedia.org/wiki/Tabuik), Festival Rendang, permainan kim, dan seni bertenun. Dan wisata kuliner, seperti rumah makan padang, Teh telur lain sebagainya.

Selanjutnya akomodasi yang dimiliki Sumatera Barat, seperti [hotel](https://id.wikipedia.org/wiki/Hotel) dan agen perjalanan yang cukup baik. Ditandai dengan berdirinya hotel sebanyak 221 dengan kapasitas kamar 5.835 unit pada akhir tahun 2012.[[24]](#footnote-25) Sementara hotel-hotel berbintang lima dan empat, hanya terdapat di Padang dan Bukittinggi. Sedangkan untuk agen perjalanan dikelola dibawah keanggotaan ASITA, untuk saat ini Sumatera Barat sudah memiliki lebih dari 100 agen. Untuk melengkapi fasilitas penunjang pariwisata, pemerintah juga menyediakan kereta api wisata yang beroperasi pada waktu tertentu.

Pemerintah propinsi Sumatera barat dalam mengelola berbagai informasi serta literatur sejarah dan kebudayaan [Minangkabau](https://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau), di [Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau](https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Dokumentasi_dan_Informasi_Kebudayaan_Minangkabau) (PDIKM) yang terletak di Perkampungan Minangkabau, [Padang Panjang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Panjang), maka wisatawan dapat memperolehnya disana. Di PDIKM terdapat berbagai dokumentasi berupa foto mikrograf, surat kabar, pakaian tradisional, kaset rekaman lagu daerah, dokumentasi surat-surat kepemerintahan, dan alur sejarah masyarakat Minangkabau sejak abad ke-18 hingga tahun 1980-an.

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang kepariwisataan yakni undang-undang nomor 10 tahun 2009 yang berbunyi bahwasanya hak buruh atau pekerja, konyisasi dan pengelola diperioritaskan pada orang atau masyarakat yang ada atau tinggal disekitar destinasi wisata, oleh karena itu saat ini pemerintah Sumatera Barat sangat konsen terhadap pengembangan wisata berbasis masyarakat pada setiap daerah Kabupaten/Kota.

Ada beberapa daerah yang sudah memulai pengembangan desa wisata Menurut kepala Bidang Destinasi daya tarik pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Deviany pada Aksi Sapta Pesona di objek wisata Mountain View Bukik Siriah, ia menyebutkan “kabupaten dan kota yang sedang menyiapkan desa wisata yaitu Padang pariaman, Agam, Padang panjang, Sawahlunto, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok Selatan.[[25]](#footnote-26)

Bentuk Desa/Nagari wisata yang dibangun yaitu dengan menggunakan rumah penduduk sebagai penginapan, konsumsi makanan khas daerah, kreatifitas kerajinan tangan, aktifitas kesenian dan kebudayaan yang akan menarik para wisatawan untuk berkunjung. Disamping daya tarik bagi pengunjung dengan kearifan lokal juga memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat setempat.

Penghargaan yang di dapatkan oleh Provinsi Sumatera Barat Khususnya Nagari Sungai Nyalo Kabupaten Pesisir Selatan bukan suatu kebetulan, tetapi adanya komitmen pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menjadi nagari (Desa) sebagai desa wisata, yang awalnya merupakan desa tertinggal. Pada saat ini daerah ini menjadi salah satu destinasi wisata Nasional yang termasuk di kawasan Mandeh yang hampir mirip dengan Raja Ampat di Irian Jaya.dan ada beberapa lagi daerah yang disiapkan sebagai desa wisata. namun secara keseluruhan pada wisata Kawasan Mandeh belum terkelola secara maksimal

Begitu juga Wisata Lubuk Nyarai merupakan wisata minat khusus yang terdapat air terjun dan hutan lindung, yang awalnya merupakan tempat penebangan hutan secara ilegal oleh masyarakat, kemudian ada insiatif dari seorang pemuda untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat yang tidak baik dengan penebangan pohon menjadi sebaliknya yaitu menjaga kelestarian hutan dengan ditemukannya air terjun yang indah didalam hutan kemudian dijadikan tempat wisata, dengan menjadikan masyarakat sebagai pemandu wisatawan, perjalanan menuju Air Terjun tersebut ditmpuh dalam waktu lebih kurang dua jam. Saat ini wisata Lubuk Nyarai diusulkan ikut lomba Destinasi Internasional sebagaimana yang dikutip dari Prokabar.com pada hari minggu 5 Agustus 2018.[[26]](#footnote-27)

Kemudian *destinasi* wisata Nagari Pariangan yang merupakan wisata Cagar Budaya dan dijuluki sebagai Nagari terindah di dunia Gelar itu diberikan oleh suatu media dari Amerika Serikat yang bernama Travel Budget. Gelar itu disematkan pada Desa ini pada tahun 2012 lalu. Desa ini bernama **Pariangan** atau **Nagari Pariangan** yang berlokasi di **Tanah Datar, Sumatera Barat**. Berkat gelar desa terindah tersebut, **Nagari Pariangan** pun kini mulai populer dikenal oleh para wisatawan.

Namun ada wisata konvensional dan bukan desa wisata yang merupakan wisata legenda yaitu wisata Pantai Air Manis yang merupakan legenda Minangkabau, yang terkenal dengan batu *Malin Kundang* dan terletak di kota padang yang sering dikunjungi wisatawan dan terdapat pesan moral yang ada pada wisata ini adalah seorang anak yang sukses dirantau kemudian pulang kampung dan tidak mengakui orangtuanya yang miskin kemudian dikutuk jadi batu.

Ada banyak destinasi wisata di Sumatera Barat sekitar 31 tempat diantaranya Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Di atas dan di Bawah, Lubang Jepang, Jam Gadang Bukittinggi, Rumah Gadang Pagaruyung, Kawasan Mandeh, pantai Air Manis, Ngarai Sianok, Harau dan lain-lain. Wisata tersebut di atas sebagian besar adalah wisata konvensional yang dikelola oleh pemerintah setempat dan hanya sebagian kecil yang merupakan desa wisata. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil empat daerah destinasi wisata sebagaimana yang dijelaskan diatas yang merupakan wisata Alam dan Budaya serta sudah mengarah pada wisata berbasis masyarakat.

Melihat kondisi di atas, sangat menarik untuk ditindak lanjuti dalam sebuah penelitian ilmiah agar berdaya manfaat bagi para stakeholder, masyarakat umum dan pecinta pariwisata terutama pariwisata di desa mengingat kebutuhan untuk pengembangan wisata di daerah pedesaan cukup menjanjikan, dengan partisipasi masyarakat tentu dapat memberikan dampak positif terhadap budaya, sosial lingkungan dan juga ekonomi bagi masyarakat.Untuk itu, pengembangan pariwisata berkelanjutan yang membahas secara khusus tentang Desa Wisata yang menggunakan pendekatan pariwisata alternatif dengan perspektif dampak menjadi harapan baru dalam pariwisata alternatif dengan judul “*Partisipasi Masyarakat Pada Implementasi Program Pariwisata Dalam Pemberdayaan masyarakat Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Sosial di Propinsi Sumatera Barat*  ,akan bisa berperan dalam menambah kekahsanahan ilmu pariwisata dan menjadi model dalam pemberdayaan masyarakat.

1. **Identifiikasi Masalah**

Bersandarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata yang terkait dengan partisipasi masyarakat dan implikasi terhadap kesejahteraan sosial antara lain:

1. Pariwisata merupakan industri non migas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sumatera barat memiliki banyak destinasi wisata dan hampir di setiap kabupaten kota, namun masyarakat yang berada disekitar destinasi wisata belum merasakan manfaat secara langsung, baik secara sosial, budaya, lingkungan maupun secara ekonomi.
2. Era otonomi daerah sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 tahun 2004, memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
3. Partisipasi masyarakat seringkali hanya digunakan sebagai label maupun alat bagi konsultan, pemerkasa proyek pembangunan, maupun pemerintah untuk menekan biaya, seperti yang diungkapkan oleh Chambers
4. Dalam UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
5. Pengelolaan pariwisata di Sumatera Barat yang berorientasikan kepada masayarakat lokal sangat sedikit. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi yang didapatkan oleh masyarakat sehingga tidak memiliki kemampuan dan finansial yang memadai dalam mengelola pariwisata yang berbasiskan budaya dan alam.
6. Dampak yang dihasilkan dari pengembangan pariwisata di desa wisata masih sangat rendah di beberapa wilayah termasuk Sumatera Barat walaupun baik di beberapa wilayah lain terutama di Jawa, Bali dan lain sebagainya.
7. **Batasan dan Rumusan Masalah**

Pemberdayaan masyarakat Islam melalui Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tentu akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga terjadi perubahan dalam aspek ekonomi, budaya, sosial dan lingkungan masyarakat setempat. Perubahan tersebut ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Dengan demikian, agar nantinya pengelolaan Pariwisata berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat lebih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan terhadap masyarakat setempat, maka sejak awal perlu dilakukan perencanaan yang matang dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Oleh karenanya, dari kajian ini pertanyaan mendasar yang akan menjadi masalah adalah **Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Implementasi Program Pariwisata dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan sosial, budaya, Spritual, lingkungan, dan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.**

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Implementasi Program Pariwisata dalam pemberdayaan Masyarakat Islam di Sumatera Barat
2. Bagaimana Implikasi Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan Pariwisata terhadap Kesejahteraan Sosial, Budaya, Spritual, Lingkungan dan Ekonomi.
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu: Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat Partisipasi Masyarakat Islam pada program pariwisata dan dampak yang ditimbulkan pada aspek budaya, sosial Spritual, lingkungan, dan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Sedangkan secara khusus, yaitu untuk;

1. Menganalisis secara komprehensif tingkat partisipasi masyarakat pada Implementasi Program Pariwisata
2. Menganalisis dampak partisipasi masyarakat pada Implementasi Program pariwisata terhadap kesejahteraan sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi.

Dilihat dari sisi kemanfaatannya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Untuk mendapatkan manfaat secara teoritis yaitu

1. Memberikan kontribusi ilmiah, masukan bagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengkaji dampak partisipasi masyarakat Islam dalam pengelolaan desa wisata pada aspek budaya, sosial lingkungan, dan ekonomi sehingga pariwisata berkelanjutan dapat diwujudkan.
2. Menambah Literatur bahan kajian penelitian dalam analisis dampak yang ditimbulkan dengan partisipasi masyarakat islam dalam pengelolaan desa wisata.

Agar penelitian ini tidak hanya sekedar publikasi ilmiah dan popularitas peneliti maka yang paling penting itu adalah manfaat praktis yang dapat dilakukan oleh penguasa dan pengambil kebijakan yaitu pemerintah dan pihak swasta sebagai berikut

1. Gambaran untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya partisipasi masyarakat islam dalam pengelolaan desa wisata pada aspek budaya, sosial lingkungan, dan ekonomi terhadap pariwisata berkelanjutan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi terkait dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh industri pariwisata sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi atau kebijakan yang diambil dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dengan bekerja sama dengan para pelaku pariwisata dengan melibatkan masyarakat yang berada disekitar industri pariwisata terutama desa wisata alam.
3. **Kajian Relevan**

Secara umum jumlah studi tentang Partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan pengembangan pariwisata alternatif yang merupakan peralihan dari pengembangan pariwisata massal (*masstourism*) sudah cukup banyak. Tetapi studi tentang pengembangan pariwisata alternatif yang membahas secara khusus tentang pengembangan Desa Wisata jumlahnya masih relatif sedikit. Sebagaimana dalam penelitian Swarsi[[27]](#footnote-28) yang berjudul *Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Bali*, penelitian ini hanya membahas secara umum tentang dampak pengembangan berbagai jenis pariwisata terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat dan tulisannya tidak membahas secara khusus tentang dampak pengembangan pariwisata terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mukaryanti[[28]](#footnote-29) dengan judul *Pengembangan Ekowisata Sebagai Pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berkelanjutan Kasus Desa Blendung- Kabupaten Pemalang* hanya membahas tentang peran serta pendidikan terutama pendidikan lingkungan dalam membangun dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan khususnya dalam pengembangan Ekowisata yang ramah lingkungan.

Kemudian Penelitian yang dilakukan Eko Murdiyanto dengan judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman*, dengan metodologi kuatitatif, mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian ini tidak membahas tentang hubungan partisipasi dengan implikasi kesejahteraan sosial, dan hanya sekedar mendeskrpsikan tinggi rendahnya keterlibatan perorangan dan masyarakat dalam pengembangan wisata alternatif.

Sebenarnya masih banyak penelitian tentang yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata tetutama pada pariwisata alternatif salah satunya desa wisata, namun penelitiannya hanya pada satu desa saja atau daerah, kemudian tidak fokus pada implikasi partisipasi terhadap kesejahteraan sosial, pada penelitian disertasi ini akan meneliti beberapa daerah pariwisata di propinsi Sumatera Barat dengan jenis penelitian Kualitatif menggunakan teknik populasi dan sampel dan kemudian bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tersebut dan implikasinya terhadap kesejahteraan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

1. **Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Barat melalui partisipasi masyarakat pada Implementasi Program Pariwisata.

Permasalahan perekonomian umat Islam saat ini sudah menjadi permasalahan bagi para juru dakwah, maka dengan demikian perlu adannya juru dakwah melakukan tindakan-tindakan dakwah nyata dalam bentuk perbuatan yang lebih memperhatikan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Antara dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebenarnya memiliki keterkaitan yang cukup signifikan bahkan secara terperinci dapat juga dikatakan bahwa dakwah sebenarnya adalah proses pemberdayaan masyarakat.

Dakwah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan bermakna perubahan sebagai prinsip dasar equilibrium dalam kehidupan sosial masyarakat yang secara alamiah terdiri dari pengklasifikasian kelas atas dan kelas bawah. Kelas bawah sebagai masyarakat yang mengalami kehidupan terasing menjadi sasaran utama dakwah untuk memberdayakannya untuk menajadi manusia seutuhnya dengan tidak menafikan masyarakat yang berada pada kelas atas. Karena itulah, dakwah sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat sebab itu berhubungan dengan proses dimana seseorang bisa terbebaskan untuk berfikir dan bertindak atas dasar kematangan berfikir dan sangup melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain dalam istilah Kant disebut sebagai pencerahan, dan juga proses mengangkat derajat serta menyelamatkan masyarakat yang kehilangan jati dirinya yang sesungguhnya.

Menurut Pranaka, awal munculnya konsep pemberdayaan adalah pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.[[29]](#footnote-30)

Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment.*. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan. Bahkan dua istilah ini, dalam batas-batas tertentu bersifat *interchangeable* atau dapat dipertukarkan.[[30]](#footnote-31)

Sementara Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Islam menurut M. Quraish Shihab[[31]](#footnote-32) konsep pembangunan bersifat menyeluruh, menyentuh dan menghujam ke dalam diri manusia, dengan demikian ajaran tersebut dapat membangun manusia seutuhnya, baik dari segi materil maupun spritual secara bersamaan. Pemberdayaan bersifat universal dalam membangun kehidupan manusia menciptakan situasi berkembang, berdaya dan mandiri yang mengarah kepada pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tidak dari satu sisi kehidupan. Sehingga antara upaya pemberdayaan yang satu bersinergi dengan upaya yang lain.

Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik maka adanya tindakan nyata yang terencana dan terorganisir dan terlembaga dengan baik. Lembaga tersebut yang diharapkan dapat melakukan pengembangan masyarakat dalam berbagai aspek.

Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kekuasaan atau kedudukan misalnya: pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan para investor. Pemerintah yang merupakan lembaga resmi dalam melayani dan mengayomi rakyat tentu paling bertanggung jawab terhadap pemberdayaan masyarakat diharapkan memiliki peran yang dominan dibanding lembaga-lembaga lainnya.

Adi Fahrudin[[32]](#footnote-33) menyoroti pengembangan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Ada kerancuan terminologi untuk merujuk pengembangan masyarakat yang ditunjukkan dari beberapa istilah yang ada seperti; *Community Work, Community Development, Community Organization, Community Action, Community Practice, dan Community Change* yang mempunyai makna dan tujuan yang sama. Pada dasarnya, pengembangan masyarakat merupakan suatu metode berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan dan mengupayakan integrasi diantaranya bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat yang terorganisir. Maka oleh sebab itu pengembangan masyarakat harus didasarkan pada asumsi, nilai dan prinsip-prinsip agar dalam pelaksanaannya dapat memberdayakan masyarakat berdasarkan kesadaran dan inisiatif, kemampuan dan partisipasi mereka sendiri. Jelaslah bahwa partisipasi masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan masyarakat sebagaimana ditunjukkan dari berbagai keberhasilan program pengembangan masyarakat di berbagai Negara. Diantara syarat partisipasi masyarakat akan terwujud jika masyarakat secara sukarela berpartisipasi dengan cara, masyarakat diberi kebebasan berpartisipasi, adanya kemampuan masyarakat berpartisipasi dan adanya peluang serta kesempatan berpartisipasi.

Sebagaimana bentuk atau tahapan partisipasi menurut para ahli diantaranya: Wilcox mengemukakan ada 5 jenjang, yaitu : *pertama,* memberikan informasi, *kedua,* konsultasi, *ketiga,* pengambilan keputusan bersama, *keempat,* bertindak bersama dan *kelima,* memberikan dukungan.[[33]](#footnote-34)

Menurut Cohen dan Uphoff menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terdiri dari :

* 1. *Participation in decision making*
	2. *Participation in implementation*
	3. *Participation in benefits*
	4. *Participation in evaluation[[34]](#footnote-35)*

Salah satu pengembangan masyarakat yang dapat dilakukan adalah bidang pariwisata sebagai industri non migas pada sektoran dalam (*leading sector*) untuk menghasilkan devisa seperti di beberapa negara didunia; Amerika, Australia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu jenis dari industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan dan standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya seperti; industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.

Dalam perspektif kemandirian lokal pada pengembangan wisata alam dan wisata budaya merupakan perwujudan interkoneksitas dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada.

Pada dasarnya pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan community based development atau community approach.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan memposisikan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks pradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma*) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya merupakan usaha kecil dan lokal semata, tetapi perlu diposisikan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.

Masyarakat lokal tentunya dalam hal ini akan memiliki peran dalam membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi.

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan daripada pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis masyarakat, tentunya dengan begitu luasnya bidang kesejahteraan sosial maka dibagi kepada dua bentuk arti kesejahteraan sosial dalam arti sempit dan arti luas.[[35]](#footnote-36) Di indonesia dalam arti sempit sering di identikkan dengan bidang-bidang yang ditangani oleh kementerian sosial. Atau diberbagai negara yang sudah berkembang dikaitkan dengan *Ministry of Health and Welfare* (Kementerian Kesejahteraan dan kesehatan)

Sedangkan untuk bidang kesejahteraan sosial dalam arti luas sering kali diidentikkan dengan bidang yang terkait dengan kesejateraan rakyat yang meliputi berbagai Kementerian seperti: Kementerian dalam negeri, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian sosial, Kementrian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Industri kreatif, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Perumahan Rakyat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesejahteraan sosial yang dimaksud pada implikasi Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan Pariwisata adalah kesejahteraan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti Material, Spritual, Sosial Budaya, dan Lingkungan yang secara seimbang diberikan kepada setiap manusia, tanpa ada yang diperioritaskan

**Raw Input**

Program Dinas Pariwisata

Partisipasi Masyarakat

**Intrumental Input**

Undang-undang Pariwisata

Anggaran

Pariwisata Alternatif

**Environmental**

Agama

Sosial

Budaya

Lingkungan

Ekonomi

Partisipasi Masyarakat

1. *Participation in decision making*
2. *Participation in implementation*
3. *participation in benefits*
4. *participation in evaluation*

Kesejahteraan Sosial, (Budaya, Lingkungan dan Ekonomi)

Pariwisata Alternatif

1. Desa Wisata Alam
2. Desa Wisata Bahari
3. Desa Wisata Cagar Budaya
4. Desa Wisata Minat Khusus

**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM**

**PROGRAM PARIWISATA**

**INPUT**

**PROSES**

**OUTPUT**

**OUTCOME**

**Gambar 1 Kerangka Pikir**

1. **Definisi Operasional**
2. **Partisipasi Masyarakat**

Kata ‘partisipasi’ berasal dari akar kata berbahasa Inggris yaitu *to participate* yang berarti ikut serta atau mengambil bagian. Menurut Tosun,[[36]](#footnote-37) partisipasi memungkinkan masyarakat, orang-orang atau penduduk melakukan berbagai kegiatan pada tingkatan yang berbeda-beda, baik lokal, regional, maupun nasional. Kemudian Partisipasi yang dilakukan dapat berbeda-beda pula, baik *manipulative participation, coersive participation*, *induced participation*, *passive participation*, maupun *spontaneous participation.*

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di beberapa *destinasi* Wisata Provinsi Sumatera Barat adalah Bentuk Partisipasi menurut Huraerah,[[37]](#footnote-38) Tahapan Patisipasi menurut Yudan Hermawan dan Yoyon Suryono[[38]](#footnote-39) dan Faktor yang mempengaruhi Partisipasi menurut Ndhara Taliziduhu.[[39]](#footnote-40) Kemudian menganalisis Implikasi partisipasi menggunakan teori Pemberdayaan Sosial, budaya, Lingkungan dan Ekonomi.

Konsep partisipasi adalah terkait dengan ‘keterlibatan suatu pihak dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain.  Menurut Tikson[[40]](#footnote-41) partisipasi merupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai stakeholders, terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat secara proaktif dalam mengatur kehidupan mereka, melalui proses pengambilan keputusan dan perolehan sumberdaya dan pemanfaatnnya.

1. **Pariwisata Alternatif/Desa Wisata**

Desa wisata yaitu sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. kemudian, ada beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem sosial dan sistem pertanian turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata.[[41]](#footnote-42)

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut produksi wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang memiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial budaya dan ekonominya,serta adat istiadat keseharian yang memiliki ciri khas arsitektur dan tata ruang desa menjadi suatu rangkaian aktifitas pariwisata.[[42]](#footnote-43)

1. **Pengembangan Masyarakat Islam**

Pengembangan masyarakat Islam terdiri dari dua komponen, yaitu pengembangan dan masyarakat Islam. Secara etimologi pengembangan berarti memberdayakan, menguatkan, membina, dan mensejahterakan.[[43]](#footnote-44) Masyarakat berarti kumpulan manusia beragama Islam. Secara terminologi pengembangan masyarakat Islam berarti usaha bersama dan terencana untuk mensejahterakan umat Islam disegala aspek kehidupan sesuai tuntunan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW.

Pengertian lain sebagaimana dikemukakan oleh Ninih Machendrawati, bahwa pengembangan Masyarakat Islam berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*) kelompok social (*jamaah*) dan masyarakat (*Ummah*). Selain itu nanih juga mengutip pendapat Amrullah Ahmad yang menyebutkan bahwa pengembangan masyrakat Islam adalah system tindakan nyata yang menawarkan alternative model pemecahan masalah *Ummah* dalam bidang social, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.[[44]](#footnote-45)

1. **Kesejahteraan Sosial**

Istilah kesejahteraan sudah banyak disalah gunakan walaupun dalam pengertian aslinya memiliki arti yang sangat mulia dengan berpedoman kepada hal yang lebih komprehensif pada keadaan yang baik, kebahagian dan kemakmuran, banyak orang yang menyamakannya dengan istilah kegiatan amal, atau di Amerika Serikat, kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan pemerintah bagi keluarga miskin dan anak-anak mereka.[[45]](#footnote-46)

Arti kesejahteraan sosial dalam penulisan ini merefleksikan konotasi lebih luas dari konsep kesejahteraan sosial. sebutan kesejahteraan sosial melihat kepada satu kondisi sosial masyarakat bukan pada philantropi, juga bukan bantuan publik yang diberikan pemerintah tetapi kondisi kejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami kejsejahteraan sosial.

Kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen.[[46]](#footnote-47) *Pertama,* sejauhmana masalah-masalah sosial ini diatur, *Kedua,* sejauhmana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan *Ketiga,* sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen ini berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas bahkan seluruh masyarakat. Ketiga elemen ini selanjutnya dapat bekerja pada level sosial yang berbeda dan harus diaplikasikan ketika sebuah masyarakat secara menyeluruh ingin menikmati apa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial

1. Amrullah Achmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial,* (PLP2M : Yogyakarta, 1983), h.2. [↑](#footnote-ref-2)
2. Moh Ali Aziz, (ed), *dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, Pradigma Aksi Metodologi,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) h. 29 [↑](#footnote-ref-3)
3. Muhammad Thair harun, *pengantar ilmu dakwah,* (proyek Pembina Perguruan Tinggi IAIN Ar Raniri Banda Aceh. 1984) h. 1-2 [↑](#footnote-ref-4)
4. Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe’I, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2001), h.27 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* h. 41 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid,* h. 42 [↑](#footnote-ref-7)
7. Yulizar D. Sanrego – Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)* , (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 66 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid,* h. 80 [↑](#footnote-ref-9)
9. Pendit S. Nyoman, *Subak Pariwisata sebagai Community Based Development***. (**Jakarta: 1994), h. 4 [↑](#footnote-ref-10)
10. Karyono M., *Kepariwisataan,* (Jakarta: PT. Gramedia Anggota IKAPI, 1997), h. 7-13 [↑](#footnote-ref-11)
11. Pitana, “*Sosiologi Pariwisata*”, (Yogyakarta:Penerbit Andi, 1992), h. 62 [↑](#footnote-ref-12)
12. Nurhayati, *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*, (Ryneka: Jakarta, 1995), h. 23 [↑](#footnote-ref-13)
13. Aprillia Theresia, NTP, dkk, *Pembangunan Berbasisi Masyarakat,* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 197 [↑](#footnote-ref-14)
14. Nurmawaty, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya* (Citra Aditiya Bakti: Bandung 2006), h. 7 [↑](#footnote-ref-15)
15. Panji & Sudarto Djoko, *Kepariwisataan* (Rineka Cipta: Jakarta, 2005), h. 32 [↑](#footnote-ref-16)
16. Argyo Demartoto*, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2009), h. 74 [↑](#footnote-ref-17)
17. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisataan,* Pasal 19 Ayat 2. [↑](#footnote-ref-18)
18. Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipastif Tipologi Strategi dan Konsep Desa Pusat Pertumbuhan,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 80. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid,* h.81 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.*h.82 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid* h.83 [↑](#footnote-ref-22)
22. <http://sumbarprov.go.id/details/news/9332>, senin 11 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-23)
23. <http://www.metrotvnews.com> [Tour de Singkarak Naikan 24 Persen Kunjungan Wisatawan](http://www.metrotvnews.com/lifestyle/read/2013/06/02/912/158561/Tour-de-Singkarak-Naikan-24-Persen-Kunjungan-Wisatawan) [↑](#footnote-ref-24)
24. <http://www.beritasatu.com> [Sektor Perhotelan di Sumatera Barat Alami Peningkatan](http://www.beritasatu.com/food-travel/117271-sektor-perhotelan-di-sumatera-barat-alami-peningkatan.html) [↑](#footnote-ref-25)
25. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/27/otr5cd280-pemerintah-sumbar-dorong-kabupaten-kembangkan-desa-wisata> , Senin 11 desember 2017 [↑](#footnote-ref-26)
26. <https://prokabar.com/lubuk-nyarai-diusulkan-ikut-lomba-destinasi-internasional/> diakses tanggal 18 januari 2019 [↑](#footnote-ref-27)
27. Swarsi, S, *Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Daerah Bali* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Denpasar, 1995) [↑](#footnote-ref-28)
28. Saraswati, A dan Mukaryanti, 2005. *Pengembangan ekowisata sebagai pendekatan pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan. Kasus Desa Blendung - Kabupaten Pemalang*. (Jurnal Teknik Lingkungan P3TL-BPPT) 6 (2): 391-396. [↑](#footnote-ref-29)
29. Yulizar D. Sanrego – Moch Taufik, *Lot cit* [↑](#footnote-ref-30)
30. Nanih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe’I, *Op cit* h. 42 [↑](#footnote-ref-31)
31. M. Qureish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat,* (Bandung: Mizan,2004), cet. Ke-18, h.301 [↑](#footnote-ref-32)
32. Adi Fahrudin, *pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat,* (Bandung, Academia: 2011) [↑](#footnote-ref-33)
33. Aprillia Theresia, NTP, dkk, *Op cit,* h. 202 [↑](#footnote-ref-34)
34. Cohen, JM, dan N.T. Uphoff, ***Rural Development Participation***, (Cornell University RDCCIS: New York, 1977). [↑](#footnote-ref-35)
35. Isbandi Rukminto Adi, *Op.cit*, h. 91-104 [↑](#footnote-ref-36)
36. Tosun C, “Towards a typology of community participation in thetourism development Process”,(*International Journal of Tourism and* *Hospitality1999*) h.494 [↑](#footnote-ref-37)
37. Abu Hurairah, *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat,* (Bandung: Humaniora, 2011), h. 116 [↑](#footnote-ref-38)
38. Herman Yudan & Yoyon Suryono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program-program pusat Kegiatan belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran.* (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat,2016), h. 6 [↑](#footnote-ref-39)
39. Ndhara Taliziduhu, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan masyarakat Tinggal Landas,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 105 [↑](#footnote-ref-40)
40. Tikson, D. *Ekonomi Terpadu dan Partisipasi Pembangunan Masyarakat MateriKuliah Program Pascasarjana Unhas, Makassar*. 2001. [↑](#footnote-ref-41)
41. Tourism Village, *Tentang Desa Wisata*, <http://www.central-java-tourism.com/desa->wisata/in/about.htm, diakses tanggal 05 Juli 2017, pukul 06.58 WIB. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ditjen Pariwisata, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, 1999, h. 35 [↑](#footnote-ref-43)
43. Ninih Machendrawati dan Agus Ahmad Syafe’I, *Lot cit*. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*, h.29 [↑](#footnote-ref-45)
45. James Midgley, *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan sosial*, (Jakarta: Ditperta Islam, 2005), h.19 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid,* h.21 [↑](#footnote-ref-47)